

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Maret 2024, secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,46% (mtm), dibandingkan deflasi bulan Februari 2024 sebesar 0,22% (mtm). Pada saat yang sama. Secara tahunan, inflasi gabungan 2 kota dan 1 Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 3,37% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 2,65% (yoy). Adapun komoditas utama penyebab inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada Maret 2024 bersumber dari kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau seperti cabai merah, telur ayam ras, kangkung, dan ayam hidup seiring dengan meningkatnya permintaan pada bulan Ramadan. Kenaikan harga juga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya emas perhiasan seiring dengan meningkatnya harga komoditas emas secara global. Di sisi lain, komoditas utama yang menahan laju inflasi berasal dari ketimun, tomat, jeruk, kacang panjang, dan bawang merah. Menurunnya harga komoditas tersebut didukung oleh ketersediaan pasokan yang memadai di tengah musim panen.

Dengan perkembangan tersebut pada Maret 2024 perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatatkan inflasi sebesar 0,46% (mtm). Secara spasial, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,45% (mtm), 0,35% (mtm), dan 0,53% (mtm). Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 3,37% (yoy) atau tetap terkendali dalam kisaran target inflasi  $2,5 \pm 1\%$ .

Pada Maret 2024, tekanan inflasi diperkirakan meningkat adapun risiko peningkatan inflasi yang perlu diwaspadai pada April 2024 yakni:

1. Kenaikan permintaan terhadap komoditas pangan secara umum menjelang HKBN Idul Fitri;
2. Berlanjutnya kenaikan harga beras sejalan dengan kebijakan relaksasi HET yang diperpanjang hingga bulan April;
3. Kenaikan harga komoditas aneka rokok.

**Terkendalnya inflasi triwulan I dikarenakan upaya dari hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Hingga bulan Maret 2024, TPID telah menggelar 92 kali operasi pasar yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau sebagai langkah antisipasi lonjakan harga sepanjang bulan Ramadan 1445 H. Mempertimbangkan hal tersebut TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dengan mengacu pada Peta Jalan (*Roadmap*) pengendalian inflasi yang telah disusun dan melakukan evaluasi secara periodik terhadap implementasi *roadmap* tersebut.**

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan pada Maret 2024 3 Kabupaten/Kota terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,37 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,49 pada Maret 2023 menjadi 105,94 pada Maret 2024. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,46 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,75 persen.

**Tabel 1. IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Maret 2024**

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2023	IHK Desember 2023	IHK Maret 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Maret 2024 <sup>1)</sup> (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Maret 2024 <sup>2)</sup> (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Maret 2024 <sup>3)</sup> (%)	Andil Inflasi m-to-m Maret 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Maret 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Umum	102,49	105,15	105,94	0,46	0,75	3,37	0,46	3,37
Makanan, Minuman, dan Tembakau	102,61	107,66	109,16	1,09	1,39	6,38	0,33	1,84
Pakaian dan Alas Kaki	101,93	104,12	105,34	0,98	1,17	3,35	0,05	0,16
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,89	102,51	102,89	0,06	0,37	0,98	0,01	0,16
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,88	101,82	102,11	-0,17	0,28	0,23	-0,01	0,01
Kesehatan	100,18	99,88	103,72	0,27	3,84	3,53	0,01	0,09
Transportasi	106,19	110,51	110,79	0,15	0,25	4,33	0,02	0,59
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,08	100,07	100,06	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,61	101,69	101,25	-0,50	-0,43	-0,35	-0,01	-0,01
Pendidikan	101,66	104,15	104,19	0,00	0,04	2,49	0,00	0,17
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	100,64	101,58	101,68	0,04	0,10	1,03	0,00	0,10
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	103,80	106,83	108,30	0,91	1,38	4,34	0,06	0,26

**Grafik 1. Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Kepulauan Riau bulan Maret, 2024 (Persen)**

Inflasi Kepulauan Riau pada triwulan I tahun 2024 upaya pengendalian inflasi masih terus dilakukan terutama dalam rangka memastikan ketersediaan barang di pasar dan menjaga kelancaran pasokan serta distribusi barang terutama disaat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Kegiatan operasi pasar akan terus diintensifkan menjelang HBKN Idul Fitri di seluruh Kabupaten/Kota, disertai dengan koordinasi melalui *High Level Meeting* (HLM) dan Rapat Koordinasi TPID.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Inflasi Provinsi Kepulauan Riau, bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2024 terkendali, pada Maret 2024 inflasi sebesar 0,46% (mtm), dibandingkan deflasi bulan Februari 2024 sebesar 0,22% (mtm). Sasaran inflasi nasional diperkirakan masih terkendali pada sekitar batas atas kisaran target inflasi  $2,5 \pm 1\%$ .

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan I Tahun 2024 antara lain:

1. Kenaikan permintaan terhadap komoditas pangan secara umum menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Berlanjutnya kenaikan harga beras sejalan dengan kebijakan relaksasi HET yang diperpanjang hingga bulan April.
2. Kenaikan harga beras akibat keterbatasan stok.
3. Potensi kenaikan harga sayur-mayur akibat cuaca ekstrem.
4. Potensi peningkatan permintaan bahan pangan strategis menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idul Fitri dan adanya potensi spekulasi pedagang yang memanfaatkan momentum tersebut.
5. Perubahan kondisi cuaca ekstrem yang dapat berisiko mengganggu distribusi dan pasokan pangan. Masih rendahnya daya beli masyarakat.
6. Kenaikan harga komoditas aneka rokok disebabkan oleh inflasi yang berpotensi mendorong dan memicunya tidak stabilnya ekonomi.
7. Produksi pangan di Provinsi Kepulauan Riau yang rendah.
8. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan strategis masyarakat.

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I tahun 2024 difokuskan pada menjaga stabilitasi harga dan ketersediaan pangan pokok terutama menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2024.

Beberapa kegiatan di triwulan I ini terkait pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menggelar 92 kali operasi pasar yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau sebagai langkah antisipasi lonjakan harga sepanjang bulan Ramadan 1445 H.
  2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga telah melaksanakan bimbingan teknis program budidaya Gerakan Sekolah Menanam (GSM) Cabai di lingkungan SMA/SMK se-Kepri, serta upaya pengendalian ekspektasi inflasi dengan himbauan belanja bijak melalui flyer, media cetak, radio, dan TV selama bulan Ramadan.
  3. Inflasi yang terkendali tersebut merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
  4. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin oleh Gubernur Kepulauan Riau melakukan monitoring sekaligus siaran pers ketersediaan pasokan beras Kepulauan Riau di Gudang Bulog Batam dalam rangka pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa evaluasi terkait kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Kegiatan operasi pasar Provinsi Kepulauan Riau akan terus diintensifkan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idul Fitri di seluruh Kabupaten/Kota, disertai dengan koordinasi melalui *High Level Meeting* (HLM) dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga terus memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah dalam pengendalian inflasi melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas cabai dari Sulawesi Utara dan Aceh.
3. Dalam rangka mengamankan ketersediaan pasokan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah akan mendorong peningkatan produksi pangan lokal terutama beras dan cabai, optimalisasi KAD yang sudah ada serta penajakan potensi KAD baru, mendorong inovasi dalam budidaya pertanian.
4. Penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD): Mendorong implementasi MoU Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang sudah ada dan memperluas kerja sama dengan daerah baru lainnya dengan melibatkan BUMD/asosiasi distributor/koperasi/kelompok tani/nelayan yang dapat dilakukan melalui *Forum Business Matching* antara produsen dan distributor.
5. Pengawasan untuk memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi.
6. Melakukan komunikasi efektif dengan mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Untuk itu agar dapat menyampaikan melalui media cetak dan media elektronik.
7. Perkembangan stok bahan pangan pokok strategis yang terkendali.
8. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian bahan pangan pokok strategis.
9. Menghimbau masyarakat untuk membeli barang kebutuhan pokok sesuai kebutuhan.
10. Memonitor dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kesiapan moda angkutan laut dan udara untuk keamanan dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok strategis.
11. Melakukan upaya pengawasan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap

agen-agen tiket angkutan *offline* serta penguatan koordinasi dengan pelaku usaha/maskapai serta otoritas bandara dan pelabuhan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan terus mengantisipasi risiko inflasi melalui sinergi dan koordinasi antar lembaga/instansi.
2. Kenaikan permintaan terhadap komoditas pangan secara umum menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idul Fitri.
3. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau berlanjutnya kenaikan harga beras sejalan dengan kebijakan relaksasi HET yang diperpanjang hingga bulan April.
4. Dalam rangka mengamankan ketersediaan pasokan, TPID mendorong peningkatan produksi pangan lokal terutama beras dan cabai, mengoptimalkan KAD yang sudah ada serta penajakan potensi KAD baru, mendorong inovasi dalam budidaya pertanian seperti implementasi *smart green house*.
5. Melakukan distribusi bibit dan kelengkapan budidaya cabai dalam rangka GSM di seluruh SMA/SMK Se- Provinsi Kepulauan Riau.
6. Memperkuat pemantauan kondisi pasokan dan harga bahan pangan di tingkat pedagang dan distributor, termasuk margin di setiap rantai distribusi terutama pada komoditas pangan strategis. Koordinasi dengan distributor perlu terus dilakukan untuk memperoleh informasi kondisi pasokan terkini dan arah harga ke depan sebagai dasar penyusunan upaya antisipasi pengendalian inflasi.
7. Mendorong peningkatan efisiensi biaya logistik, interkoneksi antar daerah/provinsi baik melalui jalur darat maupun jalur laut sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang dan kelompok transportasi bersumber dari peningkatan tarif angkutan udara dan kenaikan harga bensin. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan permintaan pada periode Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1445 Upaya ini dapat dilakukan dengan membuka rute pelayaran baru maupun peningkatan kapasitas kapal pengangkut yang sudah ada sehingga akan mempersingkat waktu tempuh serta memperlancar proses transportasi.